JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025
p-ISSN 2776-1843, e-ISSN 2807-804

GOVERNANCE NETWORK DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI DESA SEMEN KABUPATEN BLITAR

GOVERNANCE NETWORK IN CREATIVE ECONOMY-BASED TOURISM VILLAGE MANAGEMENT IN SEMEN VILLAGE BLITAR REGENCY

[a] Nadia Muslimatul Ummah, [b] Muhammad Lukman Hakim
[a] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
email: nadiaummah@student.ub.ac.id
[b] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
email: em.lukman79@ub.ac.id

Abstrak

Masalah: Pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif menuntut keterlibatan berbagai aktor karena sumber daya, kewenangan, pengetahuan, dan akses yang dibutuhkan tidak berada pada satu institusi. Namun, praktiknya menunjukkan ketimpangan peran di mana Pokdarwis menjadi aktor dominan sementara fasilitasi pemerintah belum konsisten.
Tujuan: Penelitian ini menganalisis praktik *Governance Network* dalam pengelolaan Desa Wisata Semen, Kabupaten Blitar, dengan kerangka Klijn dan Koppenjan yang mencakup *actors, interdependencies and frames, network management, institutional features, serta interactions and complexity.*
Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji melalui triangulasi.
Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring pengelolaan telah memobilisasi berbagai sumber daya, tetapi efektivitasnya masih parsial. Pokdarwis menjadi aktor dominan, sementara keterlibatan pemerintah cenderung insidental. Interdependensi antaraktor bersifat asimetris, dengan shared frame yang belum kuat. Network management

**Corresponding Author*
email: nadiaummah@student.ub.ac.id

berlangsung adaptif, informal, dan berbasis kepercayaan, tetapi belum didukung koordinasi terlembaga. Regulasi formal pun lebih berfungsi sebagai legitimasi daripada rules of the game operasional.

Jenis penelitian: Hasil Penelitian / Artikel Riset
Kata kunci: Governance Network ; Desa Wisata; Ekonomi Kreatif; Pokdarwis;

Abstract

Problems: *The management of creative economy-based tourism villages requires the involvement of multiple actors because resources, authority, knowledge, and access are distributed across institutions, leading to issues of actor dominance and inconsistent government facilitation.*
Purpose: *This study analyzes Governance Network practices in the management of Desa Semen Tourism Village, Blitar Regency, using the Klijn and Koppenjan framework covering actors, interdependencies and frames, network management, institutional features, and interactions and complexity.*
Methodology: *The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, field observation, and documentation, analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, and examined through triangulation.*
Findings: *Findings show that the governance network has mobilized diverse resources, but its effectiveness remains partial. Pokdarwis acts as the dominant actor due to its strong social resources, operational knowledge, local networks, and informal legitimacy, whereas government involvement tends to be incidental. Interdependencies are asymmetrical, and shared frames remain weak. Network management is adaptive, informal, and trust-based, but lacks institutionalized coordination forums. Formal regulations exist but function more as sources of legitimacy than as operational rules governing daily interaction.*

Paper Type: *Research paper*
Keywords: *Governance Network ; Tourism Village; Creative Economy; Pokdarwis; Interdependency*

A. PENDAHULUAN

Desa wisata berkembang sebagai salah satu pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, kehidupan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal. Dalam konteks tersebut, desa wisata tidak cukup dipahami sebagai destinasi yang menyediakan objek kunjungan, tetapi sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang mempertemukan pemerintah, komunitas, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Desa Semen, Kecamatan

Gandusari, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu contoh desa yang mengembangkan potensi tersebut melalui perpaduan wisata alam, edukasi, budaya, dan ekonomi kreatif. Desa ini memiliki sejumlah destinasi dan aktivitas wisata, antara lain KWE Puspa Jagad, Air Terjun Kucur Watu, wisata edukasi, serta berbagai produk UMKM lokal. Penelitian terdahulu juga mencatat capaian Desa Semen dalam berbagai ajang penghargaan, termasuk penghargaan tingkat ASEAN pada 2025.

Di balik capaian tersebut, pengelolaan Desa Wisata Semen memperlihatkan persoalan tata kelola yang menarik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan peran antaraktor. Pokdarwis berkembang sebagai aktor inti yang menjalankan sebagian besar fungsi operasional, koordinasi, pengembangan inovasi, dan penghubung dengan aktor eksternal. Sebaliknya, pemerintah desa dan pemerintah daerah belum menjalankan fungsi fasilitasi secara konsisten. Kondisi ini bukan semata-mata menunjukkan keberhasilan kemandirian komunitas, tetapi juga memperlihatkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap aktor tertentu. Dalam penelitian, dominasi tersebut dipahami sebagai bentuk resiliensi yang muncul karena kebutuhan praktis dan keterbatasan kontribusi aktor lain.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pengembangan ekonomi kreatif diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan desa wisata. UMKM, homestay, komunitas, dan unit usaha lokal membutuhkan akses terhadap pasar, pengetahuan, pendampingan, fasilitas, dan legitimasi. Sumber daya tersebut tersebar pada berbagai aktor. Karena itu, pengelolaan desa wisata tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan hierarkis yang hanya melihat pemerintah sebagai pengendali. Dalam perspektif Governance Network , kebijakan dan pengelolaan publik terbentuk melalui interaksi aktor yang saling bergantung, memiliki kepentingan berbeda, serta membawa kerangka pemaknaan masing-masing.

Kerangka Governance Network Klijn dan Koppenjan relevan digunakan untuk membaca kondisi tersebut karena menempatkan actors, interdependencies and frames, network management, institutional features, serta interactions and complexity sebagai bagian yang saling berkaitan. Kerangka ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi aktor, tetapi juga menjelaskan bagaimana sumber daya dipertukarkan, bagaimana kepentingan dinegosiasikan, bagaimana aturan membentuk perilaku, serta bagaimana kompleksitas interaksi memengaruhi kinerja jaringan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas Governance Network dalam pengembangan pariwisata. Hasanah et al. (2024), misalnya, mengkaji jejaring pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjung Pinang. Ghinaa et al. (2025) menggunakan kerangka Klijn dan Koppenjan untuk mengkaji Kampung Keramik Dinoyo di Kota Malang. Sementara itu, Baruno et al. (2023)

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

menelaah pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Junrejo, Kota Batu. Penelitian tentang Desa Semen oleh Diana (2024) lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan secara administratif. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap relasi jejaring, ketergantungan sumber daya, manajemen jaringan, kelembagaan, serta kompleksitas interaksi dalam pengelolaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Governance Network berlangsung dalam pengelolaan Desa Wisata Semen, terutama melalui relasi antaraktor, interdependensi, network management, institutional features, dan interactions and complexity, serta bagaimana dinamika tersebut berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana hubungan jejaring antaraktor dalam pengelolaan Desa Wisata Semen berbasis ekonomi kreatif melalui perspektif Governance Network ?

B. TINJAUAN TEORI

Governance Network

Governance Network berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan tata kelola hierarkis dalam menangani persoalan publik yang kompleks dan lintas sektor. Klijn dan Koppenjan (2016) melihat governance network sebagai arena yang diisi aktor-aktor otonom yang memiliki sumber daya, kepentingan, dan kewenangan berbeda. Tidak ada aktor yang sepenuhnya mampu mencapai tujuan sendiri sehingga interaksi, pertukaran sumber daya, negosiasi, dan koordinasi menjadi kebutuhan.

Pertama, actors, interdependencies and frames digunakan untuk membaca siapa saja aktor yang terlibat, sumber daya yang mereka miliki, bentuk ketergantungan yang terbentuk, serta cara masing-masing aktor memahami masalah, tujuan, dan solusi. Frames penting karena aktor dapat membawa pemaknaan yang berbeda mengenai apa yang menjadi persoalan dan bagaimana persoalan tersebut seharusnya diselesaikan. Perbedaan frame dapat menghasilkan inovasi, tetapi juga dapat menimbulkan misalignment dan konflik.

Kedua, network management merujuk pada strategi untuk memfasilitasi dan menjaga kualitas interaksi dalam jaringan. Pengelolaan jaringan mencakup penghubungan aktor, pembangunan kepercayaan, penyediaan forum dialog, mediasi konflik, serta penyelarasan kepentingan. Network management tidak identik dengan kontrol hierarkis, melainkan dengan kemampuan mengelola proses interaksi agar jaringan tetap produktif. Ketiga, institutional features merujuk pada aturan formal dan informal yang membentuk rules of the game. Institusi memberi stabilitas, legitimasi, dan prediktabilitas terhadap interaksi. Namun, institusi juga perlu adaptif karena jaringan beroperasi dalam lingkungan yang berubah.

Keempat, interactions and complexity menempatkan interaksi sebagai inti governance network.

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

Kebijakan dan pengelolaan publik merupakan hasil dari rangkaian interaksi yang melibatkan negosiasi, pertukaran informasi, pembentukan koalisi, dan penyesuaian strategi. Kompleksitas tidak hanya muncul karena banyaknya aktor, tetapi juga karena perbedaan kepentingan, kapasitas, sumber daya, dan ketidakpastian.

Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Desa wisata berbasis ekonomi kreatif dalam penelitian ini dipahami sebagai ekosistem lokal yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, kreativitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi ke dalam pengalaman wisata. Ekonomi kreatif memberi nilai tambah melalui kreativitas, keterampilan, inovasi, serta pengembangan produk dan pengalaman berbasis potensi lokal. Dalam konteks Desa Semen, bentuknya terlihat melalui produk olahan nanas, keripik, batik, homestay, wisata edukasi, pengelolaan lingkungan, serta unit usaha berbasis komunitas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai dinamika jejaring pengelolaan Desa Wisata Semen. Lokasi penelitian berada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dengan periode penelitian lapangan November 2025 sampai Januari 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen kelembagaan, regulasi, dokumen perencanaan, serta literatur yang relevan.

Informan ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan desa wisata. Informan mencakup unsur pemerintah daerah, pendamping lapangan, Pokdarwis, pemerintah desa, BUMDes, UMKM, pengelola Pokja Sampah/TPS3R, serta masyarakat lokal. Daftar informan dalam penelitian terdiri atas 15 orang dari berbagai posisi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif-moderat, dan dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan dimensi Governance Network Klijn dan Koppenjan. Observasi diarahkan pada praktik operasional wisata, koordinasi kelembagaan, aktivitas ekonomi kreatif, dan pola hubungan antaraktor. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa struktur kelembagaan dan aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2025, Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/690/409.06/KPTS/2019, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0009916.AH.01.07.Tahun 2023, Keputusan Kepala Desa Semen Nomor 51 Tahun 2025, serta Master Plan Desa Wisata Semen.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai aktor serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Aktor dan Ketimpangan Interdependensi

Jejaring pengelolaan Desa Wisata Semen melibatkan Pokdarwis, pemerintah desa, BUMDes, UMKM, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, serta sektor swasta. Secara formal, struktur kelembagaan telah memberikan posisi kepada pemerintah daerah sebagai pembina, pemerintah desa sebagai penasehat, dan Pokdarwis sebagai pengelola utama. Namun, posisi formal tersebut tidak sepenuhnya identik dengan intensitas peran dalam praktik.

Tabel 1

Struktur Aktor, Sumber Daya, dan Peran Empiris dalam Pengelolaan Desa Wisata Semen

Aktor	Sumber Daya Utama	Peran Empiris	Intensitas
Pokdarwis	Jaringan sosial, organisasi, pengetahuan operasional, legitimasi informal	Koordinasi, operasional, pengembangan wisata dan UMKM	Sangat tinggi; dominan
Pemerintah Desa	Kewenangan, regulasi, APBDes, legitimasi formal	Dukungan kebijakan dan fasilitasi administratif	Sedang
BUMDes	Sumber daya kelembagaan dan ekonomi desa	Mendukung kegiatan ekonomi desa	Rendah
UMKM	Produk, keterampilan produksi, tenaga kerja keluarga	Mendukung rantai nilai wisata	Sedang–rendah
Akademisi	Pengetahuan, keahlian, pelatihan, jejaring	Pendampingan dan peningkatan kapasitas	Sedang–tinggi
Pemerintah Daerah	Kebijakan sektoral dan program	Monitoring, pelatihan, pameran	Rendah
Swasta	Finansial dan material/ CSR	Dukungan program tertentu	Sangat rendah
Masyarakat	Modal sosial dan partisipasi komunitas	Dukungan sosial dan kondusivitas	Rendah

Sumber: Peneliti, 2026

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa Pokdarwis merupakan dominant actor bukan karena memiliki otoritas formal paling besar, tetapi karena menguasai kombinasi sumber daya sosial, pengetahuan operasional, jaringan, dan legitimasi informal. Dominasi ini bersifat relational: terbentuk karena aktor lain membutuhkan kapasitas dan akses yang dimiliki Pokdarwis, sementara pemerintah yang mempunyai kewenangan formal belum mengonversinya secara konsisten menjadi dukungan jaringan.

Interdependensi yang terbentuk karenanya bersifat asimetris. Masyarakat dan UMKM bergantung pada Pokdarwis serta pendamping lapangan dalam aspek pengetahuan, akses jejaring, dan pengembangan kegiatan. Di sisi lain, sektor swasta membutuhkan aktor lokal sebagai pintu masuk sosial, sedangkan desa wisata membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan. Hubungan tersebut belum berkembang menjadi interdependensi yang seimbang karena banyak relasi masih bertumpu pada aktor inti dan kebutuhan jangka pendek.

2. Perbedaan *Frames* dan Belum Terbentuknya Pemaknaan Bersama

Perbedaan *frames* terlihat dalam cara aktor memahami desa wisata. Pendamping lapangan dan Pokdarwis memaknai pengembangan desa wisata sebagai proses jangka panjang yang bertumpu pada pemberdayaan, edukasi, inovasi, dan keberlanjutan ekonomi kreatif. Masyarakat cenderung lebih pragmatis dan pada fase awal melihat desa wisata sebagai program yang abstrak. Pemerintah desa dan pemerintah daerah lebih sering memosisikan desa wisata dalam kerangka administrasi program dan capaian sektoral.

Perbedaan tersebut belum sepenuhnya dinegosiasikan menjadi shared frame. Akibatnya, aktor yang memiliki kapasitas dan posisi paling kuat lebih mampu menentukan arah pengelolaan. Situasi ini menjelaskan mengapa jaringan cenderung actor-centered. Temuan ini juga menunjukkan bahwa persoalan koordinasi bukan sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan terkait perbedaan pemaknaan terhadap tujuan dan prioritas pengelolaan desa wisata.

3. Network Management: Adaptif, Informal, tetapi Rentan

Network management di Desa Wisata Semen terutama dijalankan oleh Pokdarwis dan pendamping lapangan. Strateginya berupa workshop, diskusi, pendekatan door to door, penguatan kapasitas, serta hubungan personal dengan aktor eksternal. Pendekatan tersebut terbukti adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat dan berperan dalam membangun kepercayaan. Seince fase awal, edukasi masyarakat ditempatkan sebagai prasyarat pengembangan destinasi dan inovasi.

Namun, pola tersebut belum diikuti mekanisme koordinasi yang terstruktur. Belum tersedia forum koordinasi tetap lintas aktor, pembagian peran yang terdokumentasi secara memadai, serta arena deliberatif yang secara konsisten

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

mempertemukan pemerintah, pengelola, masyarakat, UMKM, dan mitra eksternal. Musyawarah desa dan musrenbangdes juga belum secara optimal melibatkan aktor pengelola desa wisata. Akibatnya, agenda pariwisata belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan desa.

Pola tersebut dapat diringkas sebagai adaptive-informal, actor-centered, dan trust-based network management. Kekuatan model ini terletak pada fleksibilitas, kedekatan sosial, dan kecepatan respons. Kelemahannya adalah ketergantungan terhadap figur tertentu dan rendahnya institusionalisasi. Dengan demikian, kekuatan modal sosial yang selama ini menjadi sumber daya utama perlu ditransformasikan menjadi kapasitas kelembagaan bersama agar jaringan tidak kehilangan daya hidup ketika aktor inti mengalami perubahan.

4. Institutional Features: Legitimasi Formal Belum Menjadi Rules of the Game

Secara formal, Desa Wisata Semen memiliki dasar regulasi yang relatif memadai. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2025 memberikan kerangka pengembangan desa wisata; Keputusan Bupati Nomor 188/690/409.06/KPTS/2019 memberikan legitimasi status desa wisata; Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0009916.AH.01.07.Tahun 2023 memformalkan Perkumpulan Desa Wisata Semen; sedangkan Keputusan Kepala Desa Semen Nomor 51 Tahun 2025 mengatur susunan pengurus Pokdarwis periode 2025–2029.

Masalahnya bukan ketiadaan regulasi, tetapi keterbatasan operasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan belum tersedia SOP teknis yang rinci dan terstandar untuk mengatur dinamika pengelolaan sehari-hari. Praktik lapangan masih banyak bergantung pada komunikasi lisan, kesepakatan bersama, dan penyesuaian situasional. Karena itu, regulasi lebih kuat sebagai sumber legitimasi daripada sebagai mekanisme pengarah perilaku kolaboratif.

Celah institusional juga tampak pada hubungan dengan sektor swasta. Kerja sama CSR dengan Bank BCA dan ExxonMobil hadir sebagai dukungan nyata, tetapi belum seluruhnya diformalkan melalui MoU atau perjanjian kerja sama yang mengikat. Hubungan tersebut lebih banyak dimediasi oleh brokerage dan jejaring personal Pokdarwis. Model ini efektif membuka akses sumber daya, tetapi keberlanjutannya rentan terhadap perubahan aktor, kepemimpinan, atau kepentingan perusahaan.

5. Interactions and Complexity: Jaringan Hidup tetapi Belum Terkonsolidasi

Interaksi dalam jaringan Desa Wisata Semen paling intens terjadi pada lingkar inti yang melibatkan Pokdarwis, masyarakat, UMKM, dan Pokja Sampah/TPS3R. Interaksi dengan pemerintah daerah dan swasta lebih rendah. Pola ini membantu operasional kegiatan wisata seperti event, homestay, wisata edukasi, dan pengembangan produk ekonomi kreatif, tetapi juga

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

membuat jaringan terlalu bergantung pada simpul tertentu.

Penyelesaian masalah dan konflik masih dominan menggunakan mekanisme informal dan kekeluargaan. Dalam persoalan kecil, cara ini relatif efektif karena didukung trust dan kedekatan sosial. Akan tetapi, mekanisme informal memiliki keterbatasan ketika jaringan menghadapi persoalan struktural, konflik kepentingan, atau perubahan aktor. Dengan kata lain, kompleksitas berhasil dikelola pada tingkat operasional, tetapi belum sepenuhnya dikelola pada tingkat kelembagaan.

Dominasi Pokdarwis memiliki dua sisi. Pada satu sisi, dominasi tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dan respons operasional berlangsung cepat. Pada sisi lain, arus informasi dan pengambilan keputusan yang terpusat membatasi ruang partisipasi aktor lain dan mengurangi keragaman perspektif. Temuan ini memperlihatkan karakter pseudo-collaborative: kolaborasi benar-benar terjadi dan menghasilkan output, tetapi distribusi kapasitas dan pengambilan keputusan belum cukup setara.

6. Dampak terhadap Ekonomi Kreatif

Pengembangan desa wisata telah menghasilkan dampak ekonomi positif, tetapi manfaatnya belum merata dan masih fluktuatif. Pada sentra olahan nanas Banasari, peningkatan pendapatan berada sekitar 5–10% dan cenderung stagnan karena pendampingan, inovasi produk, dan pemasaran belum berkembang optimal. Sentra keripik khas Desa Semen mengalami peningkatan sekitar 15–25% terutama ketika terdapat event atau lonjakan wisatawan. Sementara itu, pendapatan homestay dapat meningkat sekitar 20–30% ketika terdapat event atau kunjungan luar daerah, termasuk kegiatan outbound sekolah.

Tabel 2
Dampak Ekonomi Kreatif dan Dinamika Jejaring di Desa Wisata Semen

Sektor	Temuan Ekonomi	Masalah Jaringan	Makna Analitis
Olahan Nanas Banasari	Naik sekitar 5–10%; cenderung stagnan	Pendampingan, inovasi, pemasaran terbatas	Capacity building belum kuat
Keripik khas Semen	Naik sekitar 15–25% saat event	Pemasaran belum berkelanjutan; perhatian dinas tidak konsisten	Interaksi masih temporer
Homestay	Naik sekitar 20–30% saat event/kunjungan	Belum ada sistem kunjungan stabil	Manfaat bergantung momentum
UMKM secara umum	Cenderung meningkat	Koordinasi dan sistem kolaborasi lemah	Network masih emerging

Sumber: Peneliti, 2026

Data tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh potensi produk, tetapi juga oleh kualitas jaringan yang

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

menghubungkan UMKM dengan arus wisatawan, promosi, pelatihan, dan pasar. Ketika jaringan bekerja melalui event, manfaat meningkat secara temporer. Sebaliknya, ketika dukungan tidak terlembaga, manfaat sulit dipertahankan. Dengan demikian, penguatan Governance Network menjadi bagian penting dari upaya mengubah pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis momentum menjadi pertumbuhan yang lebih stabil.

7. Sintesis Temuan: Dari Network yang Bertumpu pada Aktor Menuju Network yang Terlembaga

Jika keempat dimensi dianalisis secara terpadu, Desa Wisata Semen memperlihatkan Governance Network yang telah hidup tetapi belum terkonsolidasi. Actors dan interdependencies menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dengan distribusi sumber daya yang tidak seimbang. Frames menunjukkan belum terbentuknya shared understanding yang kuat. Network management berjalan efektif dalam skala lokal melalui trust dan kepemimpinan komunitas, tetapi belum didukung arena koordinasi formal. Institutional features telah menyediakan legitimasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi aturan operasional bersama. Interactions and complexity menunjukkan bahwa jaringan adaptif dan produktif pada tingkat inti, tetapi rentan pada tingkat kelembagaan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan ketiadaan jejaring, melainkan ketidakseimbangan kapasitas dan belum terlembaganya hubungan yang telah terbentuk. Temuan ini penting karena keberhasilan Desa Wisata Semen selama ini dapat dengan mudah dibaca sebagai bukti bahwa tata kelola yang ada telah berhasil sepenuhnya. Padahal, keberhasilan tersebut justru banyak ditopang oleh kepemimpinan aktor lokal dan modal sosial. Jika jaringan ingin berkembang secara berkelanjutan, kapasitas tersebut perlu didistribusikan dan dilembagakan melalui peran pemerintah yang lebih aktif, forum koordinasi, pembagian tanggung jawab, serta kemitraan jangka panjang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa Governance Network dalam pengelolaan Desa Wisata Semen telah berjalan dan menghasilkan capaian penting dalam pengembangan wisata serta ekonomi kreatif. Namun, efektivitasnya masih bersifat parsial. Pokdarwis dan pendamping lapangan menjadi pusat penggerak karena memiliki kombinasi sumber daya sosial, pengetahuan, jaringan, dan legitimasi informal. Posisi tersebut sekaligus menciptakan ketergantungan dan ketimpangan peran karena pemerintah desa dan pemerintah daerah belum menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan penguatan kapasitas secara konsisten.

Pada tingkat pengelolaan jaringan, praktik yang terbentuk bersifat adaptif, informal, dan berbasis trust. Pola ini efektif dalam menjaga operasional dan membangun hubungan sosial, tetapi belum cukup untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Perbedaan frames

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 2 September 2025 : pp. 41-52
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i2.12569

antaraktor juga belum menghasilkan shared frame yang kuat. Sementara itu, kerangka regulasi formal telah tersedia, tetapi implementasinya masih terbatas sehingga aturan belum sepenuhnya berfungsi sebagai rules of the game. Dampak ekonomi kreatif sudah terlihat pada UMKM dan homestay, tetapi manfaatnya masih fluktuatif dan bergantung pada event atau momentum kunjungan.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan Governance Network perlu dilakukan dengan menggeser pola actor-centered menuju jejaring yang lebih terdistribusi dan terlembaga. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blitar, perlu memperkuat fungsi sebagai fasilitator dan koordinator melalui mekanisme koordinasi lintas aktor yang reguler. Pemerintah Desa Semen bersama Pokdarwis perlu memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab secara tertulis serta memperluas pelibatan masyarakat dan UMKM. Pendamping lapangan perlu mendorong distribusi pengetahuan dan kepemimpinan agar tidak terpusat pada aktor tertentu. Sektor swasta diharapkan mengembangkan kemitraan yang lebih berkelanjutan, sedangkan UMKM perlu memperkuat inovasi, kapasitas manajerial, dan pemasaran digital.

DAFTAR PUSTAKA

Baruno, A. D., et al. (2023). Pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Junrejo Kota Batu. *Syntax Idea*, 5(12), 1441–1454.

Diana, N. (2024). *Implementasi kebijakan desa wisata berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Brawijaya, Malang.

Ghinaa, A., et al. (2025). Peran Governance Network dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Keramik Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Pariwisata dan Pembangunan*, 10(2), 9–15.

Hasanah, A., Rizki, M., & Putra, D. T. (2024). Governance Network dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat di Kota Lama Tanjung Pinang. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 10(1), 45–60.

Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (2016). Governance network theory: Past, present and future. *Policy & Politics*, 40(4), 587–606.

Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (2016). *Public management and policy networks: Foundations of a network approach to governance*. Routledge.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Pratidina, G., Wahyudin, C., Apriliyani, N. V., & Amalia, N. (2023). Community participation in increasing tourism villages. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 34–41.

Zulgani, et al. (2023). Pembinaan ekonomi kreatif desa wisata Tanjung Lanjut melalui Badan Usaha Milik Desa. *Studium: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).